

ABSTRAK

Linda Ambarwati 1218040036 Tahun 2025 : Relasi Kuasa Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Aktivitas Penambangan Minyak Illegal Di Kabupaten Muaro Jambi.

Aktivitas penambangan minyak ilegal (*illegal drilling*) di Kabupaten Muaro Jambi merupakan permasalahan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, serta relasi kuasa antaraktor yang terlibat. Meskipun Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya melalui penertiban, koordinasi lintas sektor, dan implementasi kebijakan legalisasi sumur rakyat berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas *illegal drilling* masih terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah, mengkaji pengaruh *content of policy* dan *context of implementation*, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam penanganan aktivitas penambangan minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Dinas ESDM, masyarakat penambang, serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada aspek *content of policy* dan *context of implementation*, serta didukung perspektif relasi kuasa Michel Foucault.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh relasi kuasa yang bersifat patron-klien antara elit informal, pemodal, penambang, pengepul, dan sebagian aktor negara. Dari aspek *content of policy*, kebijakan telah memiliki tujuan, strategi, manfaat, dan dasar hukum yang cukup jelas melalui skema legalisasi sumur rakyat. Namun, dari aspek *context of implementation*, pelaksanaan kebijakan masih dihadapkan pada ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas *illegal drilling*, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta kuatnya pengaruh aktor informal yang menghambat efektivitas penegakan kebijakan. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya regulasi nasional, koordinasi lintas sektor, dan komitmen pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambat meliputi kepentingan ekonomi, relasi kuasa lokal, rendahnya alternatif mata pencaharian, dan lemahnya pengawasan di lapangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas isi kebijakan, tetapi juga oleh konteks sosial, ekonomi, politik, dan relasi kuasa yang berkembang di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengawasan yang berkelanjutan agar kebijakan penanganan *illegal drilling* di Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Implementasi Kebijakan, *Illegal Drilling*, Kabupaten Muaro Jambi.



ABSTRACT

Linda Ambarwati 1218040036 Year 2025: Power Relations of Local Government Policies in Addressing Illegal Oil Mining Activities in Muaro Jambi Regency.

Illegal oil drilling activities in Muaro Jambi Regency constitute a complex issue; they involve not only legal violations but are also shaped by economic and social factors, as well as power relations among the actors involved. Despite various efforts by the local government—including enforcement actions, cross-sector coordination, and the implementation of a policy to legalize community-owned wells pursuant to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Number 14 of 2025—illegal drilling activities persist. This study aims to analyze power relations within the implementation of local government policy, examine the influence of policy content and implementation context, and identify the factors that facilitate or hinder policy implementation in addressing illegal oil drilling in Muaro Jambi Regency.

This study employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were gathered through in-depth interviews, observation, and document analysis involving local government officials, law enforcement agencies, the Energy and Mineral Resources Agency (Dinas ESDM), community miners, and other relevant stakeholders. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing, utilizing Merilee S. Grindle's policy implementation theory—which emphasizes policy content and implementation context—supported by Michel Foucault's perspective on power relations.

The results indicate that local government policy implementation has not proceeded optimally due to patron-client power relations involving informal elites, financiers, miners, middlemen, and certain state actors. Regarding policy content, the policy clearly outlines objectives, strategies, benefits, and a legal basis through the community-owned well legalization scheme. However, regarding the implementation context, execution faces challenges such as the community's economic dependence on illegal drilling, weak inter-agency coordination, resource limitations, and the strong influence of informal actors that impede effective policy enforcement. Facilitating factors include national regulations, cross-sector coordination, and local government commitment, whereas hindering factors include economic interests, local power relations, a lack of alternative livelihoods, and weak field supervision. This study concludes that the successful implementation of the policy is determined not only by the quality of the policy's content but also by the social, economic, and political contexts, as well as the power relations evolving at the local level. Therefore, strengthening institutional coordination, ensuring

consistent law enforcement, empowering the community economically, and maintaining continuous oversight are essential for the policy addressing illegal drilling in Muaro Jambi Regency to operate more effectively.

Keywords: *Power Relations, Policy Implementation, Illegal Drilling, Muaro Jambi Regency.*

